

PARATE EKSEKUSI DALAM UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

**Oleh :
Fitria Arum Wibawani**

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Email: fitriaarum22@gmail.com

Abstrak

Parate eksekusi sebagai lembaga jaminan hak tanggungan dengan tujuan untuk melindungi hak kreditur dengan cara yang lebih mudah, namun pada pelaksanaannya sering kali terkendala oleh aturan yang tidak pasti. Sehingga menjadi perlu dipertanyakan dan dipertegas dalam pengaturannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan metode penelitian *statue approach*. Penelitian ini menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam pelaksanaan parate eksekusi terjadi karena dalam pengaturannya terdapat konflik norma yang menimbulkan penafsiran makna yang berbeda pada satu pokok bahasan yaitu antara Pasal 6 UUHT dengan Penjelasan Pasal 6 UUHT, Penjelasan Umum angka 9 UUHT jo Penjelasan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 224 HIR/258 RBg. Ketidak pastian tersebut mengakibatkan para pejabat lelang menjadi ragu bahkan menolak untuk melaksanakan lelang parate eksekusi dengan dasar Pasal 6 UUHT.

Kata kunci : *Parate Eksekusi, Eksekusi Hak Tanggungan, Konflik Parate Eksekusi*

Abstract

Parate execution as a mortgage guarantee institution with the aim of protecting the rights of creditors in an easier way, but in its implementation it is often constrained by uncertain rules. So it becomes necessary to be questioned and emphasized in the arrangement.

The type of research used is normative law with the statue approach research method. This study shows that inconsistencies in the execution of parate executions occur because in the regulation there is a conflict of norms that lead to different interpretations of meaning on one subject, namely between Article 6 UUHT with the Elucidation of Article 6 UUHT, General Elucidation number 9 UUHT in conjunction with the Elucidation of Article 14 paragraph (1) and (2) and Article 224 HIR/258 RBg. This uncertainty resulted in auction officials being hesitant and even refusing to carry out an execution parate auction on the basis of Article 6 UUHT.

Key Words: *Execution Parate, Mortgage Execution, Execution Parate Conflict*